

## Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Kompleks Perkantoran Kawasan Batu Enam)

Mutia Mariam<sup>1</sup>, Zulkarnaini<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau  
Email korespondensi: mutia.mariam2110@student.unri.ac.id

**Abstrack:** *This study aims to determine: (1) Management of Regional Property (BMD) of Rokan Hilir Regency, especially the management of buildings and buildings belonging to the regional government in the Batu Six office complex (2) Inhibiting Factors in the Management of Regional Property of Rokan Hilir Regency. In this study, the researcher uses the theory of (Hindawan, et al 2006:119) in which the asset life cycle has four phases, namely planning, procurement, operation and disposal. The findings in this study are that there are still many local government buildings that have stopped being activated, causing several buildings and buildings to be abandoned, starting from buildings that are still fit for use to buildings whose physical condition is no longer usable. From another phenomenon, researchers see that there is still less emphasis on local government policies in procuring regional property. The inhibiting factors in the management of regional property are the lack of quality human resources and the lack of emphasis on the government in implementing regional regulations, resulting in a lack of optimization of the management of Regional Property by the regional government.*

**Keywords:** *Management; Regional Property*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Rokan Hilir khususnya pengelolaan pada gedung dan bangunan milik pemerintah daerah di kompleks perkantoran kawasan batu enam (2) Faktor Penghambat Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori (Hindawan, dkk 2006:119) yang mana siklus hidup asset memiliki empat fase yaitu perencanaan, pengadaan, pengoperasian dan penghapusan. Temuan pada penelitian ini adalah masih banyaknya bangunan pemerintah daerah yang berhenti difungsikan sehingga menyebabkan beberapa gedung dan bangunan terbengkalai, dimulai dari bangunan yang masih layak pakai hingga bangunan yang kondisi fisiknya sudah tidak dapat digunakan. Dari fenomena lain peneliti melihat masih kurang tegasnya pemerintah daerah dalam pemberlakuan kebijakan dalam melakukan pengadaan barang milik daerah. Faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan barang milik daerah tersebut ialah kurangnya kualitas sumber daya manusia dan tidak tegasnya pemerintah dalam menjalankan peraturan daerah, sehingga mengakibatkan kurangnya pengoptimalisasian pengelolaan Barang Milik Daerah oleh pemerintah daerah.

**Kata Kunci:** *Pengelolaan; Barang Milik Daerah*

### PENDAHULUAN

Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan suatu prosedur yang menjadi tumpuan mengenai, Perencanaan, pengadaan asset untuk menghasilkan manfaat sebesar mungkin dan produktif dalam mengelola resiko dan biaya yang timbul selama masa pemanfaatan asset. Tidak hanya itu pengelolaan BMD juga berfungsi untuk mendayagunakan sehingga memberikan nilai tabah bagi pelaksanakan program pemerintah.

Tujuan pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk pengambilan keputusan yang tepat agar aset yang dikelola berfungsi secara efektif, efisien, dan bernilai tinggi. Tujuan inti Pengelolaan BMD adalah untuk meminimalisasikan pengeluaran selama umur aset bersangkutan, dapat

menghasilkan keuntungan yang maksimum, dapat mencapai penggunaan serta pemanfaatan asset secara optimum.

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Ibu Kota yang terletak di Bagan Siapi-api. Kini Bagani Siapi-api telah merubah diri dengan mempercantik lingkungan kompleks perkantoran dengan membangun berbagai bangunan yang memiliki kubah, sehingga disebut pula Kabupaten Rokan Hilir dengan Negeri seribu kubah.

Pusat pemerintahan saat ini dipindahkan kekawasan Batu Enam Kecamatan Bagan Punak Meranti, dengan mengadopsi pusat pemerintahan Putera Jaya di Malaysia dengan konsep pusat pemerintahan dan konsep wisata dan permainan. Kawasan Batu Enam menjadi pusat pemerintahan dengan dibangunnya berbagai kantor atau instansi pemerintahan, dan juga perkantoran pemerintah daerah yang dipusatkan dalam satu kawasan sekaligus tempat wisata merupakan pengembangan pembangunan daerah dengan tujuan agar segala yang berurusan dengan pemerintah mendapat pelayanan yang lebih mudah dan cepat karena berada di satu tempat yang sama.

Kawasan Batu Enam ini terletak didekat sungai Rokan, dibibir sungai kini telah di bangun beberapa patung-patung hewan dan beberapa gerai tradisional. Bukan hanya patung-patung hewan, namun bangunan perkantoran pemerintah seperti Badan Ketahanan Pangan, Kantor Pemberdayaan Wanita, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian dan Perternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Social Yang Kini Menempati Bangunan Untuk Kantor Pengadilan Negeri, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Cipta Karya, Dinas Pendidikan, Kantor Perpustakaan Dan Kearsipan, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga, Dan Dinas Perkebunan juga di bangun dengan elok sehingga dapat menarik para wisatawan lokal maupun wisatawan luar untuk mengunjungi komplek perkantoran ini (Profil Kawasan Batu Enam).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hilir yakni instansi yang bergerak dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dalam Bidang Keuangan, yang beralamat di Jl. Perwira No. 106, Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan SKPD dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah. Sebagai SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir bertugas sebagai pengawas dan penerima pendapatan asset daerah kabupaten, serta sebagai badan yang mempertanggung jawabkan semua belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam bentuk Laporan Keuangan.

Sejak tahun 2008 sampai dengan 2014, Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir banyak APBD yang dikeluarkan dalam pembangunan aset tetap berupa gedung dan bangunan pemerintahan di Kawasan batu Enam yang saat ini menjadi Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah, namun pihak Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) saat ini belum bisa mengelola dengan optimal, sehingga banyak gedung dan bangunan milik daerah menjadi terbengkalai dan tampak tidak terawat. padahal jika aset tetap berupa gedung dinas dan beberapa museum ini difungsikan dan dijalankan dengan baik, memungkinkan membawa dampak baik dalam peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Rokan Hilir.

## **METODE PENELITIAN**

Pengkajian karya ilmiah ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang bersifat analisis deskriptif. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data dari semua partisipan, menganalisis data secara induktif yakni berangkat dari tema-tema khusus ke tema-tema umum. Dan menfsirkan setiap makna data yang di peroleh. Adapun alasan peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yaitu agar peneliti dapat lebih mendalam melihat kemampuan atau kompetensi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Rokan Hilir dalam melakukan pengelolaan BMD di Kawasan Batu Enam, Bagan Siapiapi, Kabupaten Rokan Hilir melalui pengumpulan data dengan metode penelitian kualitatif.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data primer yakni data yang didapatkan oleh peneliti melakukan observasi ke lokasi penelitian dan data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan informan yakni Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah, Kepala Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan Aset. Data sekunder yang diperoleh dalam bentuk dokumen yaitu data dokumentasi gambar gedung dan bangunan, sejarah pembangaunan kawasan Batu Enam, Peraturan Pemdagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni: observasi (pengamatan), wawancara (interview), dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)**

Menurut keberadaan fisiknya, aset dibagi menjadi dua yaitu aset berwujud (*tangible asset*) dan aset tidak berwujud (*intangibile asset*). Aset berwujud (*tangible asset*) terdiri dari benda apa saja yang dapat dilihat oleh mata, yaitu seperti tanah, gedung bangunan, rumah, alat kantor, uang, kas, emas, surat berharga, mesin, barang dagang dan benda lain yang dapat dilihat. Sedangkan aset tidak berwujud (*intangibile asset*) yaitu tidak bisa dilihat seperti izin, hak paten, hak cipta, merk dagang, kekayaan intelektual dan lain sebagainya (Demetouw, Salle, and Asnawi 2005). Seperti yang diungkapkan oleh (Siregar 2004:178) aset secara keseluruhan ialah produk (barang) atau apa pun yang memiliki nilai moneter (nilai finansial), harga bisnis (*business worth*) atau harga perdagangan (*trade esteem*) yang dimiliki oleh substansi bisnis, kantor atau individu (orang).

Penelitian ini ingin melihat bagaimana pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) khususnya pada gedung dan bangunan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hilir di Kompleks Perkantoran Kawasan Batu Enam sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan BMD Kabupaten Rokan Hilir peneliti melakukan wawancara kepada informan menggunakan 4 indikator dari (Hindawan, dkk 2006:119) diantaranya yakni adanya perencanaan, pengadaan, pengoperasian, dan penghapusan. Berikut penjelasannya.

### **Perencanaan**

Rencana atau perencanaan diperlukan oleh setiap instansi dalam setiap proses kegiatan pembangunan daerah. Pada proses pembangunan daerah, perencanaan merupakan salah satu langkah awal yang wajib dipikirkan secara matang oleh Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hilir Pada saat melakukan perencanaan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hilir harus bisa melakukan identifikasi kebutuhan atas aset secara matang. Sehingga diharapkan kegiatan pembangunan daerah dapat berlangsung secara efektif dan efisien, dan meminimalisir kegagalan dalam pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa bentuk perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan yang ada, namun masih belum sesuai dengan tuntutan kebutuhan daerahnya. Karena dilihat sampai saat ini keberadaan gedung dan bangunan di kompleks perkantoran kawasan batu enam masih belum difungsikan dengan baik. Hal ini diakibatkan karena pemerintah daerah belum melaksanakan standarisasi kebutuhan yang diatur dalam PERMENDAGRI No 19 tahun 2016 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) bahwa perencanaan kebutuhan BMD harus berpedoman pada

standar barang, standar kebutuhan dan standar harga.

### **Pengadaan**

Pengadaan barang milik daerah merupakan salah satu cara untuk memperoleh barang dengan harga dan mutu yang layak serta pengadaan yang tepat waktu. prosedur dalam pelaksanaan pengadaan barang milik daerah Kabupten Rokan Hilir dilaksanakan oleh panitia yang bertanggung jawab dalam proses penyelenggaraan pengadaan yang mana panitia tersebut bisa saja ditetapkan oleh Kepala Daerah langsung maupun dari SKPD yang bersangkutan. Namun walaupun pelaksanaan pengadaan BMD telah disetujui pelaksanaannya oleh kepala daerah agar SKPD yang bersangkutan melaksanakan pengadaan asset itu sendiri, kepala daerah masih memiliki peran penting untuk menyetujui pelaksanaan barang milik daerah untuk ditetapkan status penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengadaan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku walaupun masih ada pengadaan barang yang berjalan tidak sesuai dengan perencanaan kebutuhan, yang mengakibatkan terjadinya keterbangkalaian pada gedung dan bangunan.

### **Pengoperasian**

Pengoperasian merupakan kegiatan penggunaan barang milik daerah dengan memiliki masing-masing tanggung jawab terhadap keberadaan barang atau kondisi barang. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan kepercayaan oleh Kepala Daerah dalam mengelola barang milik daerah, yang mana setiap Kepala SKPD miliki hak dan tanggung jawab penuh terhadap keadaan barang. Berdasarkan hasil penelitian dilihat bahwa para pengguna barang masih banyak yang tidak menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab terhadap pengadaan gedung dan bangunan yang saat ini banyak terbengkalai di daerah Batu enam. Dilihat dari ketetapan kebijakan pada Permendagri No.19 Tahun 2016 pasal 46 ayat (1) yang mana penetapan barang milik daerah berupa tanah/bangunan dilakukan apabila diperlukan status penggunaan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang/ kuasa pengguna barang yang bersangkutan. Dalam hal ini disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hiir belum sepenuhnya menjalankan peraturan sesuai dengan kebijakan pedoman pengelolaan keuangan dan asset yang baik.

### **Penghapusan**

Penghapusan merupakan tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar nama barang atau dari pencatatan inventaris daerah dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna barang atau pengelola barang dari tanggung jawab penguasaan barang. Dalam proses penghapusan BMD, kepala daerah akan membentuk panitia penghapusan barang milik daerah yang terdiri dari unsur instansi teknis terkait, yang mana tugas panitia tersebut meneliti barang yang rusak, dokumen kepemilikan, penggunaan, pemeliharaan, pembiayaan, dan hal-hal pendukung lainnya. Yang mana hasil penelitian tersebut akan dijelaskan dalam bentuk surat berita acara dengan melampirkan data kerusakan dan kelayakan bangunan. Selanjutnya pengelolaan mengajukan surat permohonan persetujuan kepada Kepala Daerah mengenai rencana penghapusan barang yang dimaksud dan dengan melampirkan surat berita acara hasil penelitian panitia penghapusan. Berdasarkan analisis hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa proses penghapusan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Namun belum sepenuhnya optimal karena dilihat bahwa masih ada gedung dan bangunan yang rusak dikompleks perkantoran kawasan Batu Enam belum dilakukan penghapusan.

### **Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam penanggulangan gedung dan bangunan yang terbengkalai di Kawasan Batu Enam, Bagan Siapi-api**

Dalam upaya untuk melakukan perbaikan atas gedung dan bangunan yang terbengkalai di kawasan Batu Enam agar dapat difungsikan kembali, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan beberapa tindakan yakni:

#### **1. Evaluasi Anggaran**

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir memfokuskan akan melakukan evaluasi anggaran yang ada untuk pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang terbengkalai agar dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Pemerintah kabupaten rokan hilir melakukan penilai kembali tentang kinerja satuan kerja perangkat daerah. Tujuan pemkab Rohil melakukan pengevaluasian anggaran yakni agar mengurangi kesalahan program kerja setiap SKPD, meningkatkan pengawasan serta merumuskan kembali strategi dan kebijakan dalam penyusunan anggaran SKPD.

#### **2. Rehabilitasi**

Selanjutnya upaya atas masalah asset lainnya yakni dengan melakukan rehabilitasi atau perbaikan. Dimana pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melakukan upaya rehabilitasi guna untuk memperbaiki gedung atau bangunan yang telah rusak sebagian dengan maksud menggunakan sesuai dengan fungsi tertentu yang tetap, baik arsitektur ataupun struktur bangunan pada gedung tetap dipertahankan seperti pembangunan awalnya, sedangkan utilitasnya dapat berubah. Menurut pemkab Rohil hal ini dilakukan agar pembangunan yang telah dilakukan sebelumnya tidak mubazir.

### **Faktor Penghambat Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Rokan Hilir**

Dalam upaya untuk melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik di kompleks perkantoran Kawasan Batu Enam, maka ditemukanlah beberapa kendala atau faktor penghambat dalam pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

#### **Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor terpenting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Apa lagi didalam pemerintahan, SDM merupakan penggerak suatu organisasi yang dimana kemampuan setiap manusia ini harus dapat dikembangkan.. Apabila pemerintah tidak memiliki SDM yang berkualitas, maka system pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam penelitian ini, diakibatkan dari kurangnya kedisiplinan pegawai dalam pelaksanaan penyerahan laporan pengadaan BMD sehingga menimbulkan ketidak jelasan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

#### **Implementasi Kebijakan**

Peraturan daerah dapat disebut sebagai instrument aturan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di masing-masing daerah otonom. Dilihat dari permasalahan dilapangan gedung dan bangunan yang kian tak kunjung terselesaikan disebabkan Kurangnya ketegasan pemimpin dalam membuat kebijakan mengenai peraturan bagi setiap pegawai yang diberikan tanggung jawab dalam pemeliharaan barang milik daerah untuk mengembalikan kembali barang milik daerah yang telah dipakai sehingga hal ini membawa dampak bagi proses pengelolaan asset daerah.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Pengelolaan Barang Milik

Darah (BMD) Kabupaten Rokan Hilir Khususnya di Kompleks Perkantoran Kawasan Batu Enam, maka penulis akan memberikan kesimpulan sebagai berikut: dalam pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Rokan Hilir di Kompleks Perkantoran kawasan Batu Enam masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari perencanaan kebutuhan yang kurang matang, pelaksanaan pengadaan barang milik daerah yang kurang maksimal dilihat dari proses pelaksanaan pengadaan yang kurang memperhatikan kebutuhan riil atas pelaksanaan tugas dan fungsi setiap SKPD sehingga hal ini menyebabkan beberapa barang milik daerah menjadi tidak dimanfaatkan dengan maksimal, pelaksanaan pengoperasian gedung dan bangunan yang tidak merata menimbulkan beberapa gedung menjadi tidak beroperasi dengan semestinya, namun pemerintah daerah saat ini masih melakukan pengoptimalisasian pada gedung dan bangunan tersebut agar tidak menimbulkan kerugian. Dalam hal ini peneliti melihat Penghapusan barang milik daerah sudah berjalan membaik dengan memperhatikan beberapa aspek pelaksanaan penghapusan walaupun masih ada kekurangan.

Dalam pelaksanaan Pengelolaan BMD tentunya memiliki beberapa factor penghambat yakni dilihat dari sumber daya manusia yang tidak disiplin akan berpengaruh besar dalam kelancaran pengelolaan barang milik daerah. Dan Implementasi Kebijakan juga belum berjalan baik dan terarah. Para pejabat pemerintah belum menjadikan kebijakan daerahnya sebagai patokan penting dalam menjalankan tanggung jawabnya. Saran dalam permasalahan ini, perencanaan kebutuhan harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi kesalahan kembali terhadap pelaksanaan perencanaan kedepannya dan juga menimbulkan kerugian daerah, perencanaan harus dilakukan secara matang sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD), bila perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu sebelum melakukan perencanaan kebutuhan, agar hal tersebut dapat meminimalisir kegagalan rancangan kegiatan sebelum melakukan pengadaan barang milik daerah. Untuk gedung dan bangunan yang belum difungsikan sebaiknya dilakukan pengoperasian kembali dengan mengisi gedung dengan peralatan atau barang yang sesuai dengan nama gedung seperti museum muslim dapat diisi dengan barang peninggalan atau barang bersejarah mengenai kebudayaan muslim riau. Begitu juga dengan gedung-gedung lainnya. Hal tersebut akan membawa dampak baik untuk menambah PAD Kabupaten.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfian Noor, Izzat. 2017. "Kinerja Organisasi Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang."
- Anggara, Sahya. 2016. *Administrasi Pembangunan Teori Dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ayu Eka Candra Dewi, Gusti, Haryanto Tanuwijaya, and Mochammad Arifin. 2013. "Rancang Bangunan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Komputer Dan Peripherals Pada PT. Sucofindo." 3(2):1-2.
- Demetouw, Moses, Agustinus Salle, and Meinarni Asnawi. 2005. "Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Jayapura." 2(2):1-15.
- Hanafi, Iqbal, and Nasril. 2018. "Penghitungan Nilai Aset Pada Politeknik Lp3I Jakarta Kampus Kramat." *Jurnal Teknovasi* 05:47-61.
- Hindwawan Dadi, Iwan, Arik Hariyono, and Murtaji. 2006. *Manajemen Properti: Tinjauan Real Properti Dan Aset Publik*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah (LPKPAP), Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Labasido, Esduo Ramdhan. 2019. "Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah DPKAD Provinsi Aceh." 4:136-215.

- Mashur, Dadang. 2017. *Buku Ajar Administrasi Pembangunan*. Pekanbaru: Universitas Riau Press.
- Sayekti, Fitrianingrum. 2017. "Penerapan Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat)." *Jurnal Ekubis* 2.
- Siregar, Doli D. 2004. *Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional Dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's Pada Era Globalisasi Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sumardi, IKbar Andrian. 2017. "Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016". Universitas Negeri Alauddin Makassar.
- Suparman, Nanang, and Arumsekarsari. 2018. "Pengelolaan Aset Daerah Dalam Mengujudkan Tertib Administrasi Pada DPPKD Kabupaten Seram." *Jurnal Ilmu Sosial* Vol.1. No.2.
- Syahputra, Khoirul, Yusman Syaukat, and Abdul Kohar I. 2018. "Strategi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas." 10.